

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Turki merupakan sebuah negara yang meninggalkan jejak sejarah kejayaan peradaban Islam di masa lalu, ketika negara itu masih berbentuk kesultanan atau sering disebut dengan kesultanan Turki Usmani. Pada 1923, Mustafa Kemal Ataturk berhasil merubah sistem pemerintahan negara Turki menjadi republik dan menjauhkan faktor agama dari sistem pemerintahan. Dengan kata lain, Mustafa Kemal Ataturk telah merubah Turki menjadi negara sekuler dimana dasar-dasar agama (Islam) tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan¹. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Turki yang sebelumnya selalu berpihak pada kepentingan Dunia Islam, setelah berganti republik negara ini merapat kepada negara-negara sekuler Barat (Amerika Serikat, Negara-negara Eropa dan Sekutunya).

Sebagai contohnya adalah ketika Turki mengakui kemerdekaan Israel diforum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949. Saat itu Turki merupakan negara pertama dengan mayoritas penduduk muslim yang mengakui kedaulatan Israel di kawasan Timur Tengah dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel². Sikap

¹ Ali Mukti: *Islam dan Sekulerisme di Turki Modern*. Jakarta: Djambatan, 1994.

² Nurdin, M. *Krisis baru Timur Tengah*. Accessed: 05 December 2011.
<http://www.luarnegeri.kompasiana.com/Krisis-Politik-Baru-Timur-Tengah-Turki-Mesir.htm>

Turki ini membuat geram negara-negara Islam di Timur Tengah yang merasa terancam dengan keberadaan Israel dikawasan tersebut. Lebih jauh lagi, pada akhirnya Turki menjadi negara mitra baik Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga menjadikan Turki sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara-negara Barat di Timur Tengah. Turki sendiri merupakan salah satu anggota aliansi militer NATO yang banyak beroperasi untuk mengimplementasikan kepentingan Barat.

Namun, seiring dengan perkembangan isu-isu Dunia Islam khususnya untuk wilayah Timur Tengah, beberapa kebijakan Turki belakangan ini lebih independen dan berani keluar dari tekanan kepentingan Barat. Sebelumnya pada 2002 silam, Partai Keadilan dan Pembangunan yang merupakan Partai Islam Moderat memenangi Pemilihan Umum dan Recep Tayib Erdogan berhasil menjadi Perdana Menteri Turki dari partai tersebut³. Pada masa pemerintahan pertama Erdogan, kebijakan luar negeri Turki masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Turki masih tetap merapat ke Barat dan melanjutkan kebijakan Perdana Menteri sebelumnya untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Pada pemerintah periode kedua setelah Erdogan kembali terpilih pada 2007 lalu, Turki mulai ikut terlibat aktif terhadap isu-isu Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina. Puncaknya adalah ketika para aktivis kemanusiaan yang diberangkatkan dari Turki dengan Kapal Navi Marmara berusaha untuk memberi

³ Bersama Dakwah: *Belajar Dari Kemenangan AKP Turki*. Accessed: Accessed: 05 December 2011. <http://www.bersamadakwah.com/belajar-dari-kemenangan-akp-turki.html>

bantuan kepada warga Palestina, namun diserang oleh tentara Israel. Pada insiden tersebut beberapa warga Turki tewas akibat terkena peluru militer Israel⁴. Kejadian tersebut menuai simpati dari masyarakat internasional dan Israel mendapat banyak kecaman. Kondisi dalam negeri Turki sendiri, warga meminta kepada pemerintah Turki agar mendesak Israel bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Turki akhirnya secara resmi meminta Israel untuk minta maaf dan bertanggung jawab. Namun seruan tersebut ternyata tidak mendapat respon positif dari Israel dan pada akhirnya membuat hubungan diplomatik kedua negara tidak harmonis. Dampak dari peristiwa tersebut ternyata mengandung konsekuensi yang panjang. Salah satunya yaitu Turki secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina.

Selain itu, Turki mulai sedikit demi sedikit menjauhkan diri dari kepentingan Amerika Serikat dan Sekutu. Ketika NATO beroperasi untuk menggulingkan pemerintahan Muamar Khadafi di Libya, Turki tidak ikut andil dalam operasi tersebut. Bahkan PM. Recep Tayib Erdogan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara seperti Mesir, Tunisia dan Libya yang sedang melakukan transisi demokrasi. Kedatangan Erdogan ke negara-negara tersebut disambut dengan sangat antusias oleh warga negara dari ketiga negara dan dielu-elukan sebagai “Penyelamat” Islam.

Mengutip pendapatnya Samuel Huntington, Turki yang memiliki pengalaman sebagai negara demokrasi bisa menjadi katalis dalam transformasi otokratik Timur

⁴ Ruslani dan Toto Suparto: *Obama di Balik Aksi Yahudi*. Yogyakarta:Galang Press. 2010. 145

Tengah dan mengonsolidasikan reformasi demokratik mereka. Dengan kata lain, Turki bisa menjadi *role model* bagi negara-negara itu⁵. Selain itu, kebijakan Turki juga mengarah pada meningkatnya hubungan bilateral dalam berbagai bidang dengan negara-negara Timur Tengah. Peran Turki yang semakin aktif bagi Timur Tengah sering disebut sebagai neo-ottomanisme. Sehingga sepertinya Turki ingin kembali mendapatkan peran vital bagi perkembangan Timur Tengah. Karena paska Turki berubah menjadi negara republik, Turki seakan-akan menjauh dari dinamika Dunia Islam. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Revitalisasi Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Timur Tengah Paska Insiden Penyerangan Kapal Navi Marmara 2010**”.

B. Latar Belakang Masalah

Turki adalah sebuah negara yang terletak di dua benua yaitu benua Asia dan Eropa. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km²) terletak di benua Eropa⁶. Posisi geografi tersebut menjadikan Turki sebagai negara yang terletak pada posisi yang sangat strategis. Negara ini menjadi semacam pintu penghubung yang mempertemukan antara Eropa dan Asia. Namun selama ini Turki lebih mengidentikkan dirinya cenderung ke Barat, bahkan negara ini telah terdaftar

⁵ Kuncahyono T: *Neo Ottomanisme, Kemalisme dan Erdogan*. Accessed: 05 December 2011. <http://www.kompas.com/neo-ottomanisme-kemalisme-dan-erdogan>.

⁶Ade Solihat: *Kemalisme Budaya dan Negara Turki*. Accessed: 05 December 2011. http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki.

sebagai calon anggota Uni Eropa. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Turki juga cenderung memihak kepentingan negara-negara Barat dari pada negara Timur Tengah. Padahal secara geografis negara ini lebih dekat ke Timur Tengah dari pada ke Eropa yang hanya 3% dari luas wilayahnya.

Walaupun sejak tahun 2001, Turki dipimpin oleh PM. Recep Tayyip Erdogan yang diusung oleh Partai Islam yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Menurut G. Kut⁷, sejak AKP berkuasa di 2001, politik luar negeri Turki belum pernah kontroversial, baik di tataran internasional maupun domestik dan tidak akan mengubah kebijakan luar negeri Turki, tapi sebaliknya terus mempertahankan kebijakan multi-arah, yang telah diterapkan sejak Perang Dingin.

Pada awal-awal pemerintahan Erdogan, Turki juga mempertahankan kedekatannya dengan Israel. Dan bagi kepentingan geostrategis Uni Eropa, Turki tidak dapat digantikan negara manapun, walaupun Perancis dan Jerman tidak mampu melihat hal ini. Politik kedua negara tersebut menyangkut Turki tidak berkembang dan tidak berorientasi pada hasil. Namun demikian Turki tidak akan keluar dari perundingan keanggotaan dalam Uni Eropa.

Pemerintah dalam negeri Turki terus menggalakkan proses reformasi, untuk memenuhi standar Eropa. Sebaliknya, Uni Eropa juga melaksanakan kewajibannya terhadap Turki. Hubungan antara Uni Eropa dan Turki harus diperbaiki baik secara

⁷ Detik News: *Ditangan AKP Akankah Kebijakan Luarnegeri Turki Berubah*. Accessed: 05 December 2012. <http://www.detiknews.com/di-tangan-akp-akankah-kebijakan-luarnegeri-turki-berubah.htm>

kualitatif maupun kuantitatif. Keanggotaan dalam Uni Eropa tetap menjadi tujuan akhir politik Turki. Keanggotaan tampaknya sudah sewajarnya. Langkah-langkah reformasi yang sudah diambil mengubah keadaan Turki dalam 20 tahun terakhir, dan Uni Eropa tetap sangat penting untuk menjadi faktor modernisasi. Pada saat bersamaan, AS tetap menjadi mitra paling penting untuk masa depan serta dalam politik luar negeri dan keamanan. Seperti halnya anggapan tentang kebijakan luar negeri Turki terhadap pemberontak Suku Kurdi dapat berhasil jika Amerika Serikat terus berfungsi sebagai kekuatan penentu.

Namun keadaan tersebut berubah drastis paska tragedi penyerangan kapal Mavi Marmara oleh tentara Israel yang menewaskan 9 warga negara Turki. Turki mulai terlibat sangat aktif terkait isu-su strategis di Timur Tengah dan cenderung tidak menghiraukan kepentingan Barat. Faktanya Amerika Serikat dan Uni Eropa memilih tidak bertindak apa-apa karena berurusan dengan Israel. Dalam kebijakan luar negerinya, PM. Erdogan tetap mengarahkan Turki terhadap tujuan lamanya menjadi anggota Uni Eropa⁸.

Akan tetapi antusiasmenya ditanggapi dingin oleh kenyataan meningkatnya keengganan negara-negara Uni Eropa untuk menerima Turki. Oleh karena itu, Turki melakukan manuver politik mengarah ke Timur Tengah dan cenderung bertindak lebih berani lepas dari pengaruh Barat. Atau dengan kata lain, bahwa semakin dingin

⁸ Qantara: *Turki tidak Berpaling dari Barat*. Accessed:05 December 2012. <http://www.id.qantara.de>

hubungan Turki dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa maka semakin akrab hubungannya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Republik Turki sangat tegas terhadap Israel dalam kaitannya menanggapi penyerangan negara Zionis Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang telah menewaskan 9 warganya. Para petinggi pemerintah Turki sangat kompak menentang Israel. PM. Recep Thayyib Erdogan bersama Presiden Turki Abdullah Ghul, Menlu Turki Ahmed Novotoglu sepakat untuk menuntut Israel bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Turki menunjukkan sikapnya yang sangat berani, yaitu dengan mengusir diplomat Israel dari negaranya. Lebih jauh lagi, secara sepihak pemerintah Turki membekukan semua perjanjian dengan Israel sebelum negara Yahudi itu minta maaf secara resmi atas aksi penyerangan itu⁹. Turki juga menuntut agar Israel segera membuka blokadanya terhadap rakyat Palestina yang dinilai sebagai tragedi kejahatan kemanusiaan paling keji.

Sikap Turki nyata-nyata telah membuat negeri Paman Sam khawatir. Kekawatiran tersebut cukup beralasan, hal itu dikarenakan Turki bisa saja suatu saat membangkang seperti Iran dan semakin menjauh dari kepentingan Barat. Turki sendiri terlihat menjauh dengan kerjasama yang selama ini telah dibangun dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Sikap Turki terhadap Barat terlihat ketika operasi militer NATO di Libya. Meskipun Turki salah satu negara anggota NATO namun

⁹ Oke Zone: *Hubungan Turki dan Israel Kian Membeku*. Accessed: 05 December 2012. <http://www.timurtengah.okezone.com/hubungan-turki-israel-kian-membeku.htm>

bersama Jerman tidak melibatkan dirinya dalam konflik Libya dan Timur tengah lainnya¹⁰. Sehingga negara ini mudah diterima oleh warga Timur Tengah termasuk oleh Iran sekalipun. Bahkan saat ini Turki menjadi fasilitator pertemuan Presiden Afghanistan, Hamid Karsai dengan kolega Presiden Pakistan, Ali Zarjary di Ankara, sebagaimana juga pernah menjadi tuan rumah bagi pertemuan kelompok oposisi Suriah sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa Turki memang semakin berani berperan jauh bagi Timur Tengah dan meninggalkan keterkaitannya dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Kebijakan luar negeri Turki yang cenderung memihak Timur Tengah tersebut telah membangkitkan semangat rakyat Timur Tengah yang sekarang sedang mengalami gejolak demokratisasi. Hal itu terlihat ketika Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Mesir untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan menteri luar negeri Mesir, Tunisia dan Libya. Dia disambut oleh publik Mesir layaknya menyambut idola mereka. Ribuan orang meneriakkan slogan-slogan yang menyebut PM. Erdogan sebagai "Penyelamat Islam". Apalagi saat ini Turki merupakan pemimpin dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)¹¹. Organisasi internasional yang beranggotakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan konsen terhadap isu-isu Dunia Islam.

¹⁰ Nurdin M. *Turki -Mesir Kekuatan Baru Timur Tengah Hadapi Israel*. Accessed:05 December 2012. <http://www.luar-negeri.kompasiana.com/Turki-Mesir-Kekuatan-Baru-Timur-Tengah-Hadapi-Israel.htm>

¹¹ *Republika:Berkenalan dengan PM Turki yang kini dimusuhi Israel*. Accessed:05 December 2012. <http://www.republika.co.id/lrhpmk-berkenalan-dengan-pm-turki-yang-kini-dimusuhi-israel.htm>

Pemerintah transisi Mesir menyambut baik “uluran tangan” dari Turki, bukan hanya karena memang kedua negara tersebut sangat erat kaitan hubungan historisnya tetapi juga mereka sedang menghadapi musuh yang sama yakni Israel. Sebelumnya kedua negara merupakan benteng pertahanan Israel untuk berlindung dari musuh-musuhnya yang ada di kawasan Timur Tengah. Baik Turki maupun Mesir merupakan mitra yang baik dalam mengamankan posisi Zionis Israel yang selama ini membuat resah rakyat Palestina. Namun saat ini Mesir sedang mengalami transisi demokrasi.

Sedangkan Turki dibawah pimpinan PM. Recep Tayib Erdogan berhasil meraih simpati rakyat Turki dalam Pemilu dengan merebut 49 persen suara pada 2011, serta sukses pula “memukul” telak para petinggi militer yang berusaha untuk menurunkannya dari kekuasaan. Para petinggi militer tersebut adalah para pengaman ide-ide sekulerisme yang dulu pernah berjaya di era Mustafa Kemal Ataturk agar tetap berjalan. Namun oleh Erdogan, kekuatan politik militer tersebut berhasil dipatahkan¹².

Peran Turki yang semakin aktif bagi Dunia Islam, khususnya Timur Tengah, seakan-akan ingin menampilkan sosoknya yang lama. Yaitu turki yang memiliki peran vital bagi kepentingan Dunia Islam ketika negara ini masih dalam bentuk kesultanan Turki Usmani. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa Turki akan kembali mendirikan imperium Islam. Sehingga saat ini Turki disebut sebagai Neo-

¹² Nurdin M: *Turki-Mesir Penguasa Baru Timur Tengah*. Accessed: 05 December 2011. <http://www.luar-negeri.kompasiana.com/Turki-Mesir Kekuatan Baru Timur Tengah Hadapi Israel.htm>

Otomanisme. Yaitu Turki yang bertindak berdasarkan doktrin-doktrin Islami yang dulu masih berwujud kekaisaran Otoman.

Namun, kebijakan luar negeri Turki yang merapat ke Timur Tengah bukan berarti tanpa resiko dan konsekwensi berupa kerugian yang harus diterima. Tentunya Turki akan mendapat beberapa kendala dari sekutu-sekutunya seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan Israel, yang selama ini selalu berada dibelakang kepentingan luar negeri Turki. Misalnya beberapa kerjasama Turki-Israel yang selama ini telah terjalin bisa terancam kelangsungannya. Lebih-lebih tuntutan Turki agar Israel meminta maaf dan bertanggung jawab atas insiden Kapal Mavi Marmara tidak dipenuhi. Hal itu bisa berimbas pada keretakan hubungan diplomatik antara kedua negara. Padahal kedua negara ini telah lama terlibat dalam kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Dengan putusya hubungan diplomatik sudah dapat dipastikan akan mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Misalnya bidang pariwisata, Turki dan Israel menandatangani perjanjian kerjasama pariwisata di Yerusalem pada tanggal 1 Juni 1992 dan Turki menjadi tujuan wisata kedua untuk turis Israel. Turki menerima 511.435 turis Israel pada tahun 2007, 558.183 pada tahun 2008, 311.600 pada tahun 2009, dan merosot ke tingkat paling rendah, hanya 109.600 wisatawan Israel yang datang ke Turki pada tahun 2010¹³. Selain itu, kerjasama militer antara Turki-Israel yang selama ini saling

¹³Era Muslim: *Turki Membatalkan Semua Kerjasama Dengan Israel*. Accessed:19 December 2011. <http://www.eraslim.com>

mendukung kepentingan kedua negara di Timur Tengah juga telah berakhir. Hal itu tentu membuat Israel semakin terjepit posisinya di kawasan tersebut, lebih-lebih Turki semakin dekat dengan Iran dan Suriah.

Turki selama ini juga sangat bergantung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, khususnya dalam bidang ekonomi. Secara geografis Turki dekat dengan negara-negara Uni Eropa dan sampai sekarang menjadi kandidat anggota Uni Eropa. Sehingga kegiatan ekonomi Turki cenderung dilakukan dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Tahun 2009 ekspor Turki mencapai \$110 Miliar dan tahun 2010 \$117 Miliar (terutama ke Jerman 10%, Prancis 6%, Inggris 6%, Itali 6% dan Irak 5%). Namun, impor Turki ternyata mencapai \$166 Miliar di 2010, (terutama dari Rusia 14%, Jerman 10%, Cina 9%, Amerika Serikat 6%, Itali 5% dan Prancis 5%). Hal ini menimbulkan efek ketergantungan ekonomi Turki terhadap Uni Eropa¹⁴.

Sedangkan kerjasama yang terjalin dengan Amerika Serikat lebih fokus kepada bidang militer dan pertahanan. Turki memberikan akses militer bagi Amerika Serikat untuk menempatkan beberapa pasukannya yang beroperasi di Timur Tengah. Sebagai imbalannya Turki mendapat kompensasi dari Amerika Serikat. Sebagai anggota NATO, Turki bahkan menjadi tempat bagi 90 bom nuklir B61 milik Amerika, tepatnya di Pangkalan Udara Incirlik, 40 di antaranya ditaruh pada pesawat Angkatan Udara Turki.

¹⁴ Hisbut Tahrir Indonesia: *Turki Model Keberhasilan Demokrasi Islam*. Accessed: 19 December 2011. <http://www.hizbut-tahrir.or.id/turki-model-keberhasilan-demokrasi-islam>

Konsekwensi yang harus diterima Turki memang tidak mudah. Turki harus mempersiapkan segala kemungkinan yang akan dialami apabila dengan berani berkonfrontasi dari Barat. Dalam beberapa kasus, negara-negara Barat cenderung akan menggunakan berbagai cara untuk menggulingkan penentangannya. Mulai dari embargo ekonomi dan perdagangan, dikucilkan dalam forum-forum internasional seperti PBB dan WTO, hingga penggunaan sanksi militer.

Namun, sebagai kekuatan politik yang dominan di kawasan Timur Tengah, Turki terus menunjukkan keaktifannya dan Turki tidak ragu-ragu lagi untuk menempatkan dirinya di tengah kontroversi besar. Negara ini semakin terlibat dalam isu-isu strategis di Timur Tengah, seperti upaya mediasi Turki untuk mengatasi krisis nuklir Iran dan insiden Mavi Marmara yang merupakan wujud dukungan Ankara untuk memecahkan blokade Israel di Gaza, Palestina. Belum lagi pencapaian sukses ekonomi dan pemerintahan dalam negeri, secara langsung ikut menaikkan posisi tawar Turki di antara negara-negara lain.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah Mengapa Turki melakukan revitalisasi kebijakan luar negerinya terhadap Timur Tengah paska insiden kapal Mavi Marmara 2010?

D. Landasan Teoritis

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut:

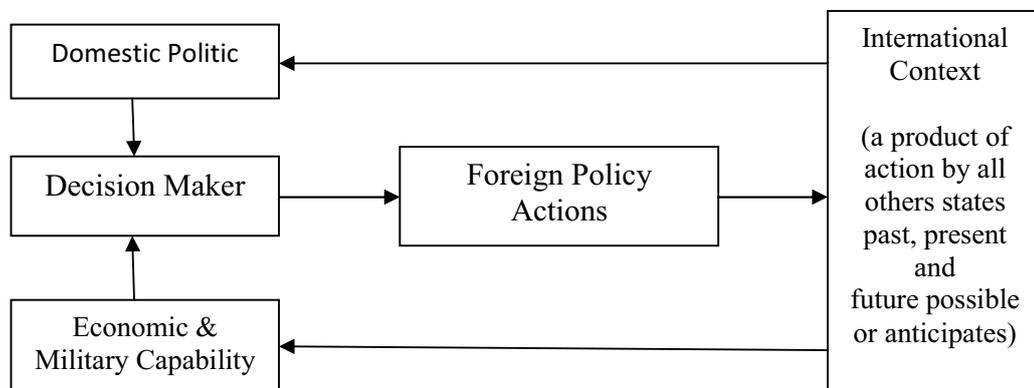
1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D.Coplin).

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkain keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Turki, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkain proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya.

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua* adalah

kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain¹⁵. Berikut adalah model teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri:

Gambar 1. 1
Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin



a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “*policy influencer*”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

¹⁵ William D Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2. 2003. 30

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Teori William D Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara atau dalam bahasan Easton disebut sebagai *input*¹⁶. *Input* tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legeslatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan dilembaga politik

Dalam konteks Turki, Turki merupakan negara yang menganut sistem sekuler dalam hal pemerintahan, walaupun negara ini memiliki sejarah panjang terkait

¹⁶ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. 77

kepemimpinan di Dunia Islam yaitu pada era kekaisaran Otoman. Namun, ketika Mustafa Kemal merubah sistem negara Turki dari kekaisaran menjadi republik, Turki mulai mengubah struktur politik dalam negeri yang memisahkan unsur keagamaan dalam pemerintahan. Sehingga hal ini pada akhirnya juga mempengaruhi kebijakan luar negerinya yang cenderung memihak kenegara-negara Barat dari pada negara-negara Islam Timur Tengah. Walaupun secara kultural historis seharusnya Turki lebih proaktif memihak kepentingan Dunia Islam dari pada kepentingan sekuler Barat.

Pada 2001 partai Islam Turki berhasil memenangkan pemilu dan Recep Tayyip Erdogan memimpin Turki sebagai Perdana Menteri. Kemenangan Partai Islam Turki nyata-nyata tetap tidak mengubah arah kebijakan politik luar negeri. Bahkan negara ini tetap menjaga hubungan baik dengan Israel dan menjadi mitra baik Amerika Serikat dalam isu-isu Timur Tengah. Namun hal itu berubah ketika 9 orang warga negara Turki tewas akibat diserang oleh tentara Israel dalam operasi kapal Navi Marmara. Kejadian tersebut membuat rakyat Turki jengah dan menuntut kepada pemerintah pusat agar mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Tuntutan yang begitu besar dari rakyat Turki membuat Pemerintah melakukan tindakan tegas kepada Israel yang berujung dengan konfrontasi dan menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara ini menjadi tidak harmonis.

Saat ini pemerintahan Turki dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Erdogan merupakan pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan, atau AKP pada tahun 2001 yang berbasis ideologi Islam dan sering dikaitkan dengan Gerakan

Ikhwanul Muslimin. Walaupun begitu, Dia mendukung pendekatan moderat dalam partainya. Ini pula yang membuat AKP mampu menarik para pemilih moderat untuk mendukung Erdogan, sehingga menjadi penyokong utama kemenangan pemilu pertama partainya pada tahun 2002. AKP telah memenangkan tiga pemilihan umum lainnya sejak saat itu.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja¹⁷. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dalam era industri modern, jika ekonomi mampu memproduksi barang secara masal maka ia juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan masal melalui industry senjata yang semakin destruktif. Jika tanah dan emas menjadi tolak ukur diabad feodal, maka kemajuan industri menduduki posisi penting dalam era modern

¹⁷ William D Coplin. 112

ini. Coplin mencotohkan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang keduanya pada saat itu terlibat perlombaan senjata dalam Perang Dingin. Kedua negara merupakan negara yang telah makmur secara ekonomi. Ekonomi negara didukung oleh sektor industri modern, sehingga mampu untuk memproduksi peralatan militer yang lebih canggih dibanding dengan negara-negara yang masih mengandalkan sektor pertanian dalam negeri untuk menopang perekonomian nasionalnya.

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya¹⁸. Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan merujuk pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana akan efektif. Misalnya Amerika Serikat, paska Perang Dingin negara ini semakin agresif menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kepentingan nasionalnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk merubah sistem politik internasional.

Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin

¹⁸ William D Coplin. 124

terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya¹⁹.

Kebijakan politik Turki yang semakin konfrontasional kepada Barat didukung oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi dan militer nasionalnya. Pertumbuhan ekonomi Turki saat ini cukup menjajikan ditengah-tengah kondisi ekonomi dunia sedang mengalami krisis. Sedangkan militer Turki, saat ini menduduki peringkat ke 6 terkuat didunia, atau terkuat nomer 1 dikawasan Timur Tengah. Dengan kemampuan militer dan ekonomi yang semakin baik, Turki dapat terlibat aktif dalam sistem politik dikawasan dan lebih mandiri menentukan kebijakan luar negerinya.

Hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan negara-negara Timur Tengah telah menggeser Turki dari kebijakan tradisionalnya yang pro Barat. Krisis ekonomi yang dialami Amerika Serikat dan Eropa membuat negara ini melirik Timur Tengah sebagai mitra bisnis dan perdagangan. Kebijakan baru AKP yang condong ke Timur Tengah berpijak dari rasa percaya diri. Ketika PM Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengecam Israel, dia sejatinya tengah memalingkan perhatiannya kepada Dunia Islam pada umumnya dan Timur Tengah khususnya. Dan hal itu semakin terbukti dengan berbagai kesepakatan dan kerjasama baru yang disepakati oleh Turki dengan negara-negara Timur Tengah. Bahkan Turki enggan mengikuti sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.

¹⁹ Budi Winarno. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: Buku Seru, 2011.

c. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif²⁰. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis²¹. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting. Faktor geografi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dll. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota. Pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan.

²⁰ William D Coplin. 166

²¹ William D Coplin. 167

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah²²:“Tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”. Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri.

Konsep kepentingan nasional merupakan hasil telaah para pemikir realisme. Hans. J Morgenthau menyatakan bahwa²³:“Politik itu sendiri pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik”. Morgenthau yakin bahwa setiap pemimpin negara merasa wajib melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan pada kepentingan nasional dan pemimpin akan disalahkan apabila gagal mencapainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional diartikan sebagai

²² Jack C. Plano & Roy Olton, “Kamus Hubungan Internasional”, terjem. Wawan Juanda. Jakarta: Putra A Bardin. 1999.

²³ Sorensen, R. J. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. 100

kelangsungan hidup (survive) suatu negara yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas budayanya dalam dunia internasional.²⁴

Menurut Kenneth Waltz seorang ilmuwan realis, mendasarkan kepentingan nasional terhadap tatanan politik internasional yang bersifat anarki yang tersebar di antara negara-negara²⁵. Tidak ada negara manapun yang menjamin bahwa kehidupan suatu negara akan sejahtera dan damai. Sehingga juga tidak ada yang menjamin bahwa suatu negara tidak akan melakukan tindakan tertentu untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Waltz menambahkan, negara-negara serupa dalam semua hal fungsi dasarnya, yaitu disamping perbedaan budaya, ideologi, konstitusi atau personal, mereka menjalankan tugas-tugas dasar yang sama. Semua negara harus mengumpulkan pajak dan menjalankan kebijakan luar negeri.

Namun, negara sangat berbeda hanya mengacu pada kapabilitas mereka yang sangat beragam. Dalam kata-kata Waltz sendiri “unit-unit negara dibedakan khususnya oleh besar atau kecilnya kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas yang serupa.....struktur suatu sistem berubah seiring perubahan dalam distribusi kapabilitas antar unit-unit sistem”. Dengan kata lain, perubahan sistem internasional terjadi ketika negara-negara berkekuatan besar muncul dan tenggelam, dan dengan

²⁴ Thomson, Hans J Morgenthau dan Kenneth W. *Politik Antar Bangsa (terj)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

²⁵ Robert Jacson dan Sorensen. 115

demikian perimbangan kekuatan bergeser. Alat-alat yang khas dari perubahan itu adalah perang negara-negara berkekuatan besar.

Oleh karena itu, negara-negara berkekuatan besar dalam tatanan dunia internasional yang anarki, menurut Kenneth Waltz lebih memiliki kesempatan yang besar untuk mempengaruhi kebijakan yang berlaku bagi semua negara. Akibatnya, negara-negara yang memiliki kekuatan kecil sering kali mendapat kerugian dari “ulah” negara yang memiliki kekuatan lebih besar. Turki memang negara yang tidak memiliki kekuatan besar baik dari segi militer maupun ekonomi dibanding Amerika Serikat. Namun dalam peta politik Timur Tengah, negara ini memiliki posisi strategis yang dapat diandalkan oleh Barat untuk menjadi penyeimbang kekuatan dan stabilitas keamanan Timur Tengah untuk mendukung. Turki menjadi salah satu penentu kepentingan Barat terhadap isu-isu Timur Tengah. Dengan kata lain, kepentingan Barat di Timur Tengah tidak akan berjalan baik apabila Turki tidak memihaknya.

Selama ini Turki berperan sebagai “pengaman” kebijakan-kebijakan Negara Barat terhadap kepentingan mereka di Timur Tengah. Posisi Turki yang secara geografis dekat dengan Timur Tengah, menjadikan Negara ini sebagai pintu masuk mobilitas dari dan menuju Eropa yang sangat strategis. Perubahan orientasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah, tentu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Negara Barat. Keberpihakan Turki terhadap kepentingan Timur Tengah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan Turki dianggap sebagai penyelamat bagi mereka. Tentu hal ini lebih menguntungkan Turki, karena Negara

Barat saat ini tidak begitu bisa diandalkan karena harus berkuat dengan masalah krisis ekonomi. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Turki mungkin dianggap sebagai Negara yang memiliki kapabilitas kecil dalam sistem politik Internasional dibandingkan mereka. Namun, bagi Timur Tengah Turki memiliki kapabilitas yang cukup signifikan bagi kepentingan Timur Tengah.

E. Hipotesa

Berdasarkan Teori-Teori yang dikemukakan penulis diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada kondisi dalam negeri Turki, saat ini negara tersebut dipimpin oleh PM. Erdogan yang merupakan kader dari partai berbasis Islam. Sehingga secara ideologis Turki merasa perlu merapat ke Timur Tengah, kawasan yang dulunya merupakan bagian dari kesultanan Turki Usmani dari pada ke Barat yang jauh dari sejarah kejayaan peradaban Islam. Sedangkan insiden kapal Mavi Marmara pada 2010, semakin menguatkan Turki untuk merapat ke Timur Tengah. karena tuntutan masyarakat dalam negeri juga semakin kuat untuk menuntaskan masalah tersebut.
2. Berdasarkan kondisi Ekonomi dan Militer; Ekonomi Turki sedang mengalami pertumbuhan yang positif, sehingga mampu menjadi pilar utama penopang kebijakan luar negeri Turki secara maksimal dikawasan Timur Tengah. Namun, Turki merasa perlu untuk mengembangkan mitra ekonomi negaranya. Sedangkan militer Turki, walaupun memiliki kekuatan yang cukup memadai

namun masih kalah dengan militer Amerika Serikat dan Inggris. Sehingga kebijakan luar negeri Turki masih belum lepas dari kedua negara tersebut.

3. Sedangkan menurut konteks Internasional, saat ini Uni Eropa dan Amerika Serikat terjerat krisis ekonomi yang pelik. Kondisi tersebut member peluang bagi Turki untuk berperan lebih aktif dikawasan Timur Tengah. Selain itu, ekonomi Timur Tengah sedang bangkit, sehingga Turki memandang Timur Tengah adalah mitra yang sesuai untuk meningkatkan kondisi ekonomi domestik.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah paska peristiwa penyerangan terhadap kapal Navi Marmara pada tahun 2010.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan mengapa Turki melakukan revitalisasi kebijakan luar negeri terhadap Timur Tengah dan peran Turki lebih jauh bagi Timur Tengah.

G. Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian kualitatif. Detil yang dijelaskan dalam skripsi ini melalui data sekunder. Yaitu studi literatur, yang diutamakan data tertulis bentuk cetak seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan diktat kuliah. Serta juga berusaha melengkapinya dengan data tertulis bentuk elektronik seperti e-book dan website dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan yaitu:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

H. Batasan Penulisan

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan batasan penulisan. Oleh karena itu penulis hanya membatasi jangkauan penelitian pada bidang kajian tentang alasan-alasan yang mendasari mengapa pemerintah Turki melakukan revitalisasi kebijakan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah paska insiden penyerangan Navi Marmara pada tahun 2010 silam.

I. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.
- Bab II Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran pemerintahan Turki pada era kekhalifahan Turki Usmani dan paska reformasi pada 1923 oleh Mustafa Kemal Ataturk.
- Bab III Pada bab ini penulis akan membahas tentang dinamika politik dan ekonomi dalam negeri Turki dan mengkaitkannya dengan perkembangan politik dan ekonomi di Timur Tengah.
- Bab IV Bab ini berisi upaya revitalisasi kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah paska penyerangan kapal Navi Marmara serta menggambarkan peran-peran Turki di Timur Tengah paska kejadian tersebut.
- Bab V Pada bab ini berisi Penutup / Kesimpulan, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.